



Tata Kelola Kelembagaan BPBD Kabupaten Sumbawa dalam Penanggulangan Dan Penyaluran Donasi Bantuan Bencana (Studi Kasus Kebakaran Permukiman di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Tahun 2026)

Muh Larangga Arafat

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: baru83732@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 02, 2026

Revised June 18, 2026

Accepted June 30, 2026

Keywords:

New Institutionalism,
Institutional Carriers,
Institutional Governance,
BPBD, Good Governance,
Disaster Relief Distribution

ABSTRACT

This study analyzes the institutional governance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sumbawa Regency in disaster response and relief-donation distribution following a residential fire in Kalimango Village, Alas District, on 22 March 2026. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed descriptively and interpretively using Scott's (2021) three institutional pillars, regulative, normative, and cultural-cognitive, traced through four institutional carriers (symbolic systems, relational systems, routines, and artifacts), supported by Das's (2023) and UNDP's (2021) good governance dimensions. The findings show that BPBD holds a strong, hierarchically grounded regulative mandate that is not matched by equally strong routine, artifact, and relational carriers, as reflected in the absence of an emergency distribution SOP, a workforce of only 38 personnel covering 24 sub-districts, and a 78-minute emergency response time. Of nine good governance dimensions examined, only participation and responsiveness fell into the moderate category, while the remaining seven, including transparency and accountability, were weak. Consequently, about 22% of households received duplicate assistance and about 8% experienced delays of more than one week. The study concludes that BPBD's governance weaknesses stem primarily from imbalances among institutional carriers rather than from the institutional pillars themselves, and recommends developing an integrated Disaster Management Information System (SIMBA), establishing an emergency distribution SOP, adopting an Incident Command System (ICS), and strengthening community participation in decision-making.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 02, 2026

Revised June 18, 2026

Accepted June 30, 2026

Keywords:

Kelembagaan Baru,
Institutional Carrier, Tata
Kelola, BPBD, Good

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana dan penyaluran donasi bantuan pascakebakaran permukiman di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, pada 22 Maret 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif menggunakan tiga pilar kelembagaan Scott (2021) yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang ditelusuri melalui empat institutional carrier (sistem simbolik, sistem relasional, rutinitas, dan artefak), dengan dimensi



*Governance, Penyaluran
Donasi Bencana*

good governance Das (2023) dan UNDP (2021) sebagai instrumen analisis pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sumbawa memiliki mandat regulatif yang kuat dan berjenjang, namun kekuatan tersebut tidak diimbangi oleh carrier rutinitas, artefak, dan relasional yang menentukan pelaksanaan di lapangan, sebagaimana tercermin dari ketiadaan SOP distribusi darurat, keterbatasan personel (38 orang untuk 24 kecamatan), dan waktu respons yang mencapai 78 menit. Dari sembilan dimensi good governance yang dianalisis, hanya partisipasi dan responsivitas berada pada kategori sedang, sementara tujuh dimensi lainnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas, berada pada kategori lemah. Akibatnya, sekitar 22% kepala keluarga menerima bantuan berganda dan sekitar 8% mengalami keterlambatan lebih dari satu minggu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan tata kelola BPBD bersumber terutama dari ketimpangan antar-carrier institusional, bukan dari lemahnya pilar kelembagaan itu sendiri, dan merekomendasikan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA), penyusunan SOP distribusi darurat, penerapan Incident Command System (ICS), serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



*Corresponding Author:***Muh Larangga Arafat**

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: baru83732@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebakaran permukiman merupakan salah satu ancaman bencana paling destruktif di dunia. International Association of Fire and Rescue Services (CTIF, 2023) mencatat lebih dari 4,6 juta kasus kebakaran terjadi setiap tahun secara global, menewaskan lebih dari 90.000 jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir melampaui USD 300 miliar. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2023) melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 menegaskan bahwa efektivitas respons bencana lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan ketimbang kecepatan penanganan fisik semata. Aldrich (2019) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki kelembagaan pengelola bencana yang transparan dan akuntabel pulih lebih cepat dan lebih berkeadilan.

Di Indonesia, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2025) menunjukkan tren kejadian kebakaran permukiman yang terus meningkat, dari 1.847 kasus pada 2021 menjadi 2.671 kasus pada 2024, dengan kerugian material di atas Rp600 miliar per tahun. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kabupaten/kota sebagai koordinator utama, termasuk dalam pengelolaan dan penyaluran donasi bantuan. Namun secara empiris, Putri et al. (2022) menemukan bahwa BPBD tingkat kabupaten umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, fragmentasi koordinasi lintas sektor, dan lemahnya akuntabilitas distribusi



bantuan. Shalih dan Nugroho (2021) menambahkan bahwa akar persoalan tersebut terletak pada ketidakjelasan pembagian kewenangan dan minimnya sistem informasi manajemen bencana, sementara Handoyo et al. (2024) menyoroti bahwa mekanisme pembiayaan risiko bencana di Indonesia masih jauh dari ideal.

Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara konsisten menempati posisi dengan kasus kebakaran permukiman tertinggi di provinsi tersebut sepanjang 2023-2025, dengan 14 kasus yang berdampak pada 612 jiwa. Pada 22 Maret 2026, kebakaran permukiman terjadi di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, mengakibatkan 36 unit rumah rusak dan 129 jiwa kehilangan tempat tinggal. Peristiwa ini memunculkan sejumlah persoalan tata kelola dalam penyaluran donasi, di antaranya duplikasi data penerima bantuan, keterlambatan distribusi, minimnya pencatatan pada jalur donasi informal, kebutuhan kelompok rentan yang tidak terpenuhi, dan pengelolaan donasi tunai melalui rekening pribadi yang tidak resmi. North (2020) menegaskan bahwa ketika institusi formal tidak memiliki kapasitas memadai, institusi informal akan mengisi kekosongan tersebut, kerap tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, sementara Peters (2021) menekankan pentingnya kapasitas lembaga dalam mengintegrasikan aktor-aktor dengan kepentingan berbeda ke dalam satu sistem koordinasi yang koheren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana tata kelola kelembagaan BPBD Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Desa Kalimango; dan (2) bagaimana mekanisme penerapan prinsip good governance oleh BPBD Kabupaten Sumbawa dalam penyaluran donasi bantuan bencana kepada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola kelembagaan BPBD serta menganalisis mekanisme koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran donasi bantuan bencana, dengan harapan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kelembagaan dan manajemen bencana serta kontribusi praktis bagi perbaikan sistem BPBD Kabupaten Sumbawa.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan baru (*new institutionalism*) dari Scott (2021) sebagai kerangka analisis utama. Scott membagi institusi ke dalam tiga pilar: pilar regulatif yang menekankan aturan, hukum, dan sanksi formal; pilar normatif yang menyoroti nilai dan norma sosial yang membentuk ekspektasi peran; serta pilar kultural-kognitif yang berkaitan dengan kerangka makna bersama dan asumsi *taken-for-granted* yang memandu perilaku aktor. Ketiga pilar ini ditelusuri melalui empat *institutional carrier*, yaitu sistem simbolik (regulasi dan mandat formal), sistem relasional (pola hubungan antar-aktor dan lembaga), rutinitas (SOP dan prosedur kerja baku), dan artefak (infrastruktur, sistem informasi, dan sarana pendukung).

Sebagai instrumen analisis pendukung, penelitian ini menggunakan dimensi *good governance* dari Das (2023) yang menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bencana hampir selalu berpangkal pada absennya tiga dimensi secara bersamaan, yaitu



transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta delapan prinsip good governance UNDP (2021) yang meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keberkeadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Kombinasi kedua kerangka tersebut menghasilkan sembilan dimensi analitis yang digunakan untuk menilai praktik penyaluran donasi bantuan bencana di Desa Kalimango.

Penelitian terdahulu memperkuat relevansi kerangka ini. Harakan et al. (2025) menemukan bahwa kolaborasi antar-lembaga merupakan faktor paling determinan dalam ketahanan kota terhadap kebakaran. Radeana et al. (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan bencana secara signifikan memengaruhi pencapaian good governance di tingkat desa. Aldrich (2019) menegaskan keterbatasan modal sosial: modal sosial komunitas yang kuat dapat memobilisasi bantuan dengan cepat, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi kapasitas kelembagaan formal yang terstruktur dan akuntabel, sebuah tesis yang menjadi salah satu titik uji empiris dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan desain studi kasus (Creswell & Creswell, 2023; Yin, 2023), yang dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena tata kelola kelembagaan BPBD dalam konteks yang kompleks dan sarat makna sosial. Penelitian dilaksanakan di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, kantor BPBD Kabupaten Sumbawa, dan kantor Pemerintah Desa Kalimango, selama April-Juli 2026.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: observasi partisipatif terhadap proses distribusi bantuan dan koordinasi antar-lembaga; wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Kepala Desa Kalimango beserta perangkat desa, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan relawan, serta masyarakat terdampak kebakaran; dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan resmi, serta data lapangan (Bowen, 2009). Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2022) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, ketekunan pengamatan, dan pemeriksaan sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Kelembagaan BPBD: Analisis Tiga Pilar Institusional

Pada pilar regulatif, BPBD Kabupaten Sumbawa memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari amanat perlindungan warga negara dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2010 tentang



Pembentukan BPBD. Namun, kekuatan carrier sistem simbolik ini tidak diimbangi oleh carrier rutinitas dan artefak: BPBD belum memiliki SOP distribusi darurat, hanya memiliki 38 personel untuk menjangkau 24 kecamatan seluas 6.643,98 km², dan mengelola Dana Siap Pakai sebesar Rp500 juta per tahun. Ketimpangan ini tercermin langsung pada respons kebakaran Desa Kalimango, di mana tim BPBD baru tiba di lokasi 78 menit setelah laporan diterima.

Pada pilar normatif, ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan keadilan distribusi bantuan belum terinternalisasi dalam praktik kerja BPBD dan pemerintah desa. Hubungan kerja antar-lembaga masih bersifat informal dan personal, sehingga garis pertanggungjawaban menjadi kabur ketika muncul persoalan seperti duplikasi data penerima manfaat. Pada pilar kultural-kognitif, ditemukan carrier yang paling lemah: budaya organisasi yang masih paternalistik dan ketiadaan sistem informasi manajemen bencana yang terintegrasi. Pencatatan data korban yang dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai pihak menjadi akar utama duplikasi data penerima bantuan.

Mekanisme Good Governance dalam Penyaluran Donasi Bantuan Bencana

Dari sembilan dimensi good governance yang dianalisis berdasarkan kerangka Das (2023) dan UNDP (2021), hanya dimensi partisipasi dan responsivitas berada pada kategori sedang, sementara tujuh dimensi lainnya berada pada kategori lemah. Partisipasi masyarakat memang masif dalam bentuk tenaga dan donasi, tercermin dari lebih dari 200 relawan individu dan 12 organisasi kemasyarakatan yang terlibat, tetapi bersifat partisipasi semu karena tidak diimbangi pelibatan dalam pengambilan keputusan. Transparansi menjadi dimensi paling lemah karena tidak tersedia papan informasi publik maupun laporan berkala mengenai donasi yang diterima dan disalurkan.

Pada dimensi efektivitas, ditemukan sekitar 22% kepala keluarga (setara delapan KK dari estimasi total terdampak) menerima bantuan berulang akibat tidak adanya sistem data tunggal, dengan empat versi data korban yang beredar secara bersamaan, sementara sekitar 8% kepala keluarga mengalami keterlambatan bantuan lebih dari satu minggu karena proses verifikasi data yang memerlukan tiga hari dengan hanya tiga personel BPBD yang menangani. Pada dimensi supremasi hukum, sebagian donasi tunai disalurkan melalui rekening pribadi kepala desa karena belum tersedianya rekening bencana resmi desa, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan etika. Rekapitulasi permasalahan struktural juga menunjukkan bahwa kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti bayi, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, belum terpenuhi karena needs assessment yang dilakukan tidak berbasis kerentanan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola BPBD Kabupaten Sumbawa bukan terletak pada lemahnya pilar kelembagaan secara keseluruhan, melainkan pada ketimpangan antar-carrier institusional, di mana carrier sistem simbolik (regulasi) jauh lebih kuat dibandingkan carrier rutinitas, artefak, dan



relasional yang justru menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan argumen North (2020) dan Peters (2021) bahwa efektivitas kelembagaan sangat bergantung pada keseimbangan kapasitas operasional, bukan semata kekuatan mandat hukum. Studi kasus Desa Kalimango juga membuktikan secara empiris tesis Aldrich (2019) mengenai keterbatasan modal sosial: mobilisasi ratusan relawan dan aliran donasi masyarakat dalam waktu singkat tidak dapat menggantikan fungsi kapasitas kelembagaan formal yang terstruktur dan akuntabel. Dengan demikian, defisiensi tata kelola penyaluran donasi bencana di Desa Kalimango bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kegagalan teknis atau kelalaian individual aktor tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Sumbawa memiliki mandat regulatif yang kuat dan berjenjang, tetapi kekuatan tersebut tidak diikuti oleh carrier rutinitas, artefak, dan relasional yang menentukan pelaksanaan di lapangan. Ekspektasi normatif masyarakat terhadap transparansi belum terinternalisasi dalam praktik kerja lembaga, dan pilar kultural-kognitif menjadi dimensi paling lemah akibat ketiadaan sistem informasi manajemen bencana yang terintegrasi. Dari sembilan dimensi good governance, tujuh dimensi berada pada kategori lemah, dengan transparansi sebagai dimensi terlemah dan sekitar 22% KK menerima bantuan berganda serta 8% mengalami keterlambatan lebih dari satu minggu. Secara keseluruhan, kelemahan tata kelola bersifat struktural dan sistemik, bersumber dari ketimpangan antar-carrier institusional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BPBD Kabupaten Sumbawa membangun Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) yang terintegrasi untuk mencegah duplikasi data penerima manfaat, menyusun dan mensosialisasikan SOP distribusi bantuan dengan protokol darurat D+1, menerapkan mekanisme keterbukaan informasi melalui papan informasi publik dan laporan distribusi berkala, mengembangkan Incident Command System (ICS) yang baku, serta mengadvokasi peningkatan alokasi Dana Siap Pakai dan penambahan personel terlatih. Pemerintah Kabupaten Sumbawa disarankan memfasilitasi pembentukan Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPBDes) dan menyediakan anggaran bagi rekening bencana resmi tingkat desa. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui studi komparatif antar-kabupaten, mengeksplorasi penerapan teknologi digital berbasis GIS, serta memberikan perhatian lebih pada dimensi kesetaraan gender dan kerentanan dalam distribusi bantuan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P. (2019). Challenges to coordination: Understanding intergovernmental friction during disasters. *Politics & Policy*, 47(2), 169-197.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025). Pusat Data Informasi Kebencanaan Indonesia 2025. BNPB.



- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). Distribusi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kabupaten/Kota NTB Tahun 2023-2025. BPBD Provinsi NTB.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Das, P. S. (2023). Good governance strategies for disaster management. Dalam R. B. Singh, S. Mal, & D. Tiwari (Eds.), *International handbook of disaster research* (hlm. 401-421). Springer.
- Handoyo, B., Sutrisno, A., & Widodo, P. (2024). Disaster risk financing governance reform in Indonesia: Addressing systemic vulnerabilities. *SAGE Open*, 14(2), 1-15.
- Harakan, A., Firman, A., Rahman, H., & Wijaya, T. (2025). Inter-agency collaboration in building urban fire resilience in Indonesia. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7, 1456890.
- International Association of Fire and Rescue Services (CTIF). (2023). *World fire statistics 2023: Report No. 28*. CTIF.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- North, D. C. (2020). *Institutions, institutional change and economic performance* (Reprinted). Cambridge University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peters, B. G. (2021). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (4th ed.). Edward Elgar Publishing.
- Putri, D. W., Santoso, B., & Haryadi, M. (2022). Efektivitas BPBD Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan pra-bencana banjir. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6234-6249.
- Radeana, Y., Wibowo, A., & Santoso, D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 17(1), 23-40.



Scott, W. R. (2021). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (5th ed.). SAGE Publications.

Shalih, O., & Nugroho, B. (2021). Kapasitas kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana: Kajian lintas kabupaten di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1), 1-18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Good governance and sustainable development: Principles and practice*. UNDP.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030: Progress report*. UNDRR.

Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.